

# **Analisis Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Sewa Pesawat Terbang Dari Luar Daerah Pabean Oleh Perusahaan Penerbangan Niaga Nasional = Policy Analysis of Value Added Tax on Lease of Aircraft from Foreign Country By the National Aeronautics Company**

Silalahi, Jhon Frans, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920537044&lokasi=lokal>

---

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui justifikasi perubahan kebijakan fasilitas PPN kepada Penerbangan Angkutan Niaga Nasional dan menganalisis perbedaan perlakuan antara sewa pesawat dalam negeri dengan sewa pesawat dari luar negeri dilihat dari asas netralitas. Pendekatan penelitian menggunakan teknik kualitatif dengan tujuan deskriptif. Data yang dikumpulkan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara mendalam dan sumber data relevan lainnya, sedangkan data sekunder yang dikumpulkan berasal dari jurnal, buku, dan sumber penelitian lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan fasilitas PPN untuk memberikan kemudahan dalam bisnis perusahaan penerbangan dan mengikuti perkembangan industri. Adanya perbedaan perlakuan dalam transaksi pemanfaatan sewa pesawat dalam negeri dengan sewa pesawat dari luar negeri yang menyebabkan tidak sesuai dengan asas netralitas.

.....

This study aimed to determine the justification of VAT facility policy changes to the National Commercial Transport Aviation and analyze the difference between the treatment of domestic aircraft lease and foreign aircraft leases be observed from the principle of neutrality. The research approach used qualitative technique with descriptive purpose. Data collected using primary and secondary data. Primary data used are the results of in-depth interviews and other relevant data sources, while secondary data collected comes from journals, books, and other research sources. The results showed that the VAT facility policy changes to provide convenience to airlines in business and follow industry development. There are differences treatment of transactions in the utilization of domestic aircraft leases and foreign aircraft leases that caused it isn't accordance with the principle of neutrality